



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B)
Albantani – Serang
Blok F Nomor 1

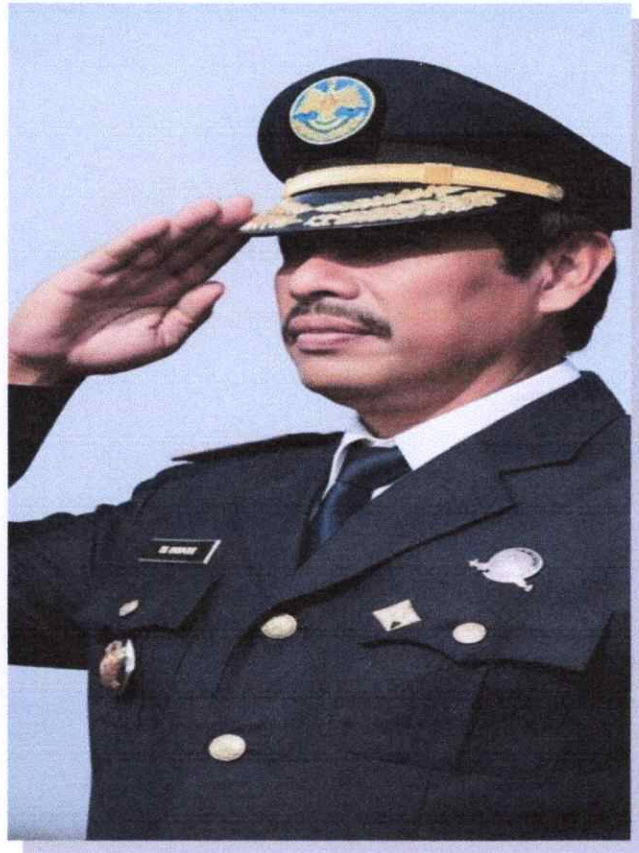
KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 dengan baik.

Adapun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**



TRI NURTOPO, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19660530 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3.1. MAKSUD	4
1.3.2. TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	7
2.1.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERRAH	6
2.1.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	9
2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	15
2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	18
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	18
2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	19
2.2.2. ISU STRATEGIS	21
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029	24
3.2. SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029	24
3.3. STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	26
3.4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN	27
3.5. PROGRAM PRIORITAS RENSTRA TAHUN 2025-2029	29
3.6. RUMUSAN PROGRAM PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH	32
BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36

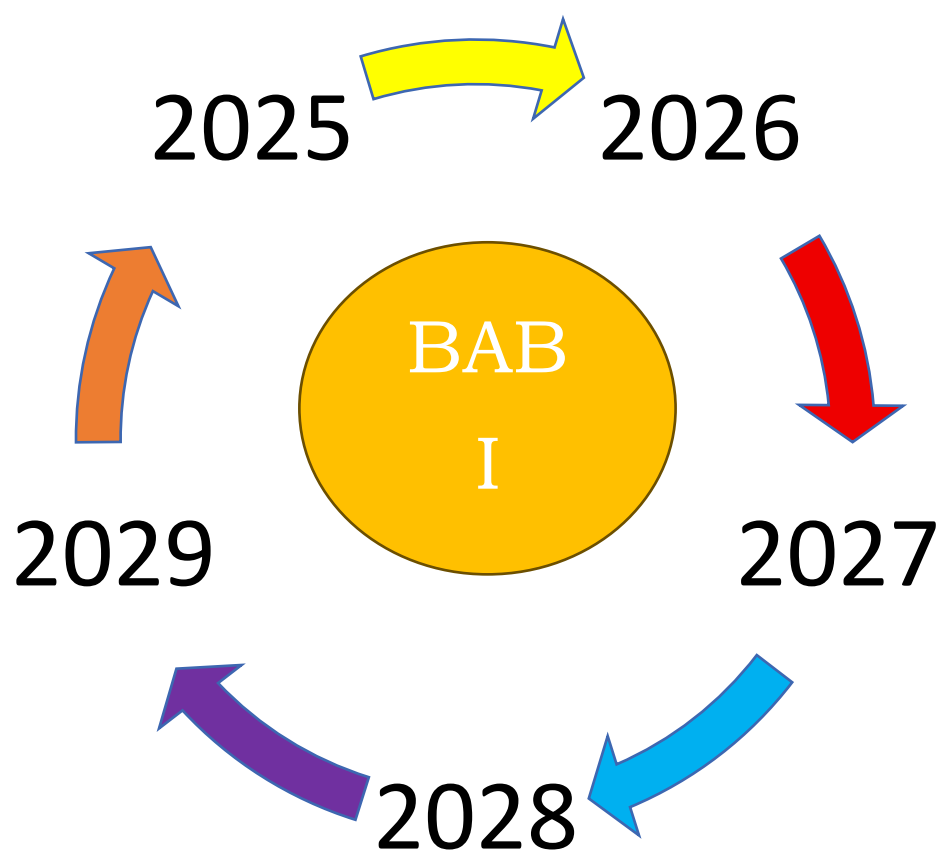
4.1. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	36
4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	81
4.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	81
BAB V PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten Berdsarkan Status	9
Tabel II.2 Pegawai Dinas Perhubungan Berdsarkan Pendidikan	9
Tabel II.3 Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Besar	11
Tabel II.4 Kendaraan Sepeda Motor	13
Tabel II.5 Capaian Indikator Pada Periode Renstra Sebelumnya	15
Tabel II.6 Capaian Indikator Program Pada Periode Renstra Sebelumnya	16
Tabel II.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	19
Tabel II.8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel II.9 Isu Strategis Urusan Perhubungan	22
Tabel III.1 Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten	25
Tabel III.2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten	26
Tabel III.3 Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten	27
Tabel III.4 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029	29
Tabel III.5. Indikasi Kegiatan Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029	33
Tabel IV.1. Program Kegiatan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Provnsi Banten	37
Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	55
Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Proritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	78
Tebal IV.4 Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Provinsi Banten	81
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Provinsi Banten	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten	8
Gambar II.2 UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan	8
Gambar II.3 Jumlah pegawai berdasarkan status PNS	9
Gambar II.4 Jumlah pegawai berdasarkan status PPPK	10
Gambar III.1 Program Unggulan Dan Program Turunan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra adalah singkatan dari Rencana Strategis. Ini adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dan berisi strategi atau arahan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Dokumen ini biasanya berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, dalam skala Pemerintahan daerah dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada Tahun 2025 - 2029 Provinsi Banten Telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 65 ayat 1 berbunyi Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 agar Gubernur memerintahkan kepala perangkat daerah menyusun Rencana Starategis Perangkat Daerah tahun 2025 -2029 secara simultan dan terkordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Dengan adanya instruksi di atas maka Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyusun Rentra tahun 2025 – 2029 dengan mengusung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

Sebagaimana keterangan di bawah ini: **VISI BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI** untuk **MISI** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh;
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Bardasarkan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki korelasi dengan Misi Ke 4 yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas”.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Apek legalitas hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
 24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 31);
 25. Peraturan Gubernur Banten Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

1.3.1.Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
2. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029;
4. Menjadi dasar perencanaan tahunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
6. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 sistematika penyusunan Renstra OPD dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Meyajikan data - data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Banten disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data – data lainya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat

Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta indikator kinerjanya.

BAB IV

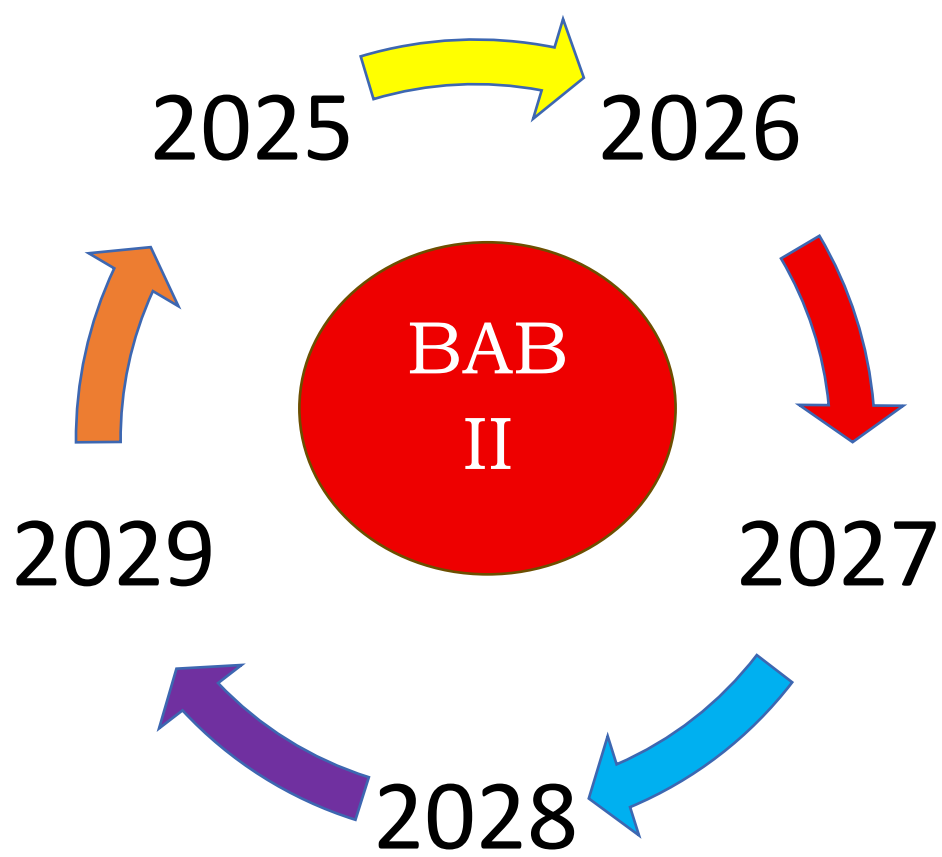
Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perhubungan yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

BAB V

Penutup

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan Renstra, Indikasi Program dan Kegiatan selama 5 (lima) Tahun.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Perhubungan memiliki arti kegiatan yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah yang meliputi bidang darat, laut, dan udara.

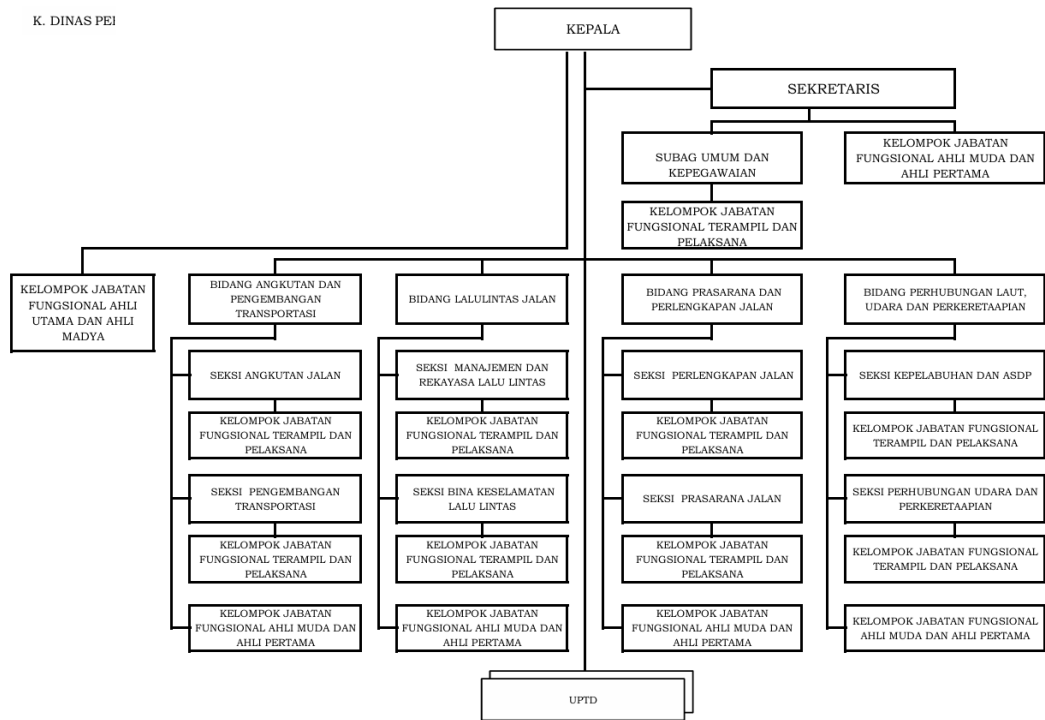
Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki tugas untuk menjalin keterhubungan antar moda transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi.

2.1.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Prasarana Perhubungan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

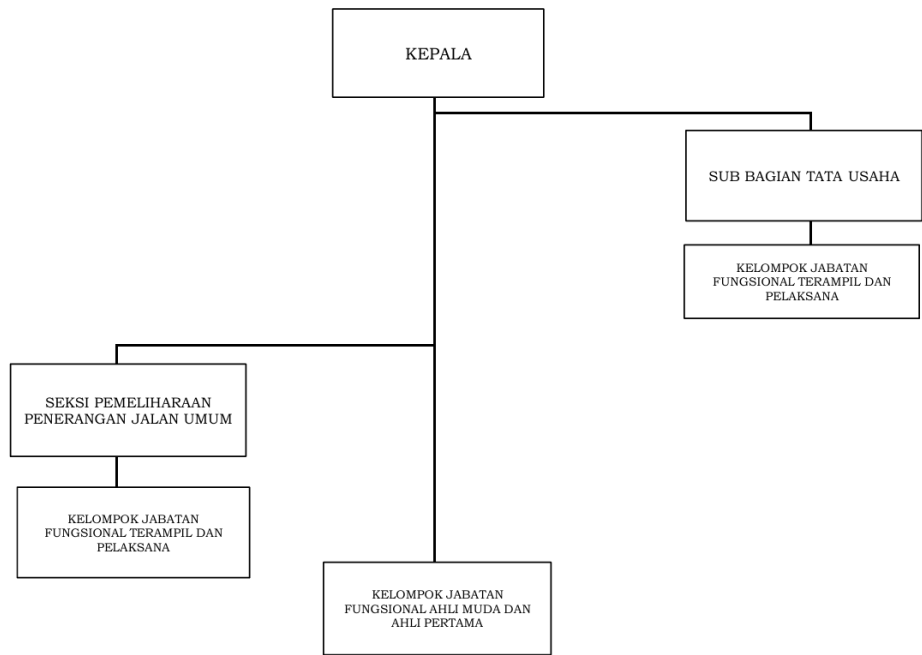
1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi, membawahkan:
 - 1) Kepala Seksi Angkutan Jalan; dan
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Transportasi.
 - d. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan:
 - 1) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2) Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas.
 - e. Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan membawahkan membawahkan:
 - 1) Kepala Seksi Perlengkapan Jalan; dan
 - 2) Kepala Seksi Prasarana Jalan
 - f. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Perkeretaapian, membawahkan:
 - 1) Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP; dan
 - 2) Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian.
 - g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar II.1 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Sumber: Pergub Banten Nomor 48 Tahun 2022

2. Susunan organisasi UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan terdiri atas:
- Kepala;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Gambar II.2 UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan

Sumber: Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2023

2.1.2.SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2025 berjumlah 90 (sembilan puluh) pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil), 207 (dua ratus tujuh) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 35 (tiga puluh lima) Pegawai Paruh Waktu, dengan total keseluruhan jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebanyak 332 orang.

Untuk lebih jelas mengenai rincian pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten Berdsarkan Status

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	72	18	90
PPPK	176	31	207
Paruh Waktu	33	2	35
JUMLAH	313	51	332

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

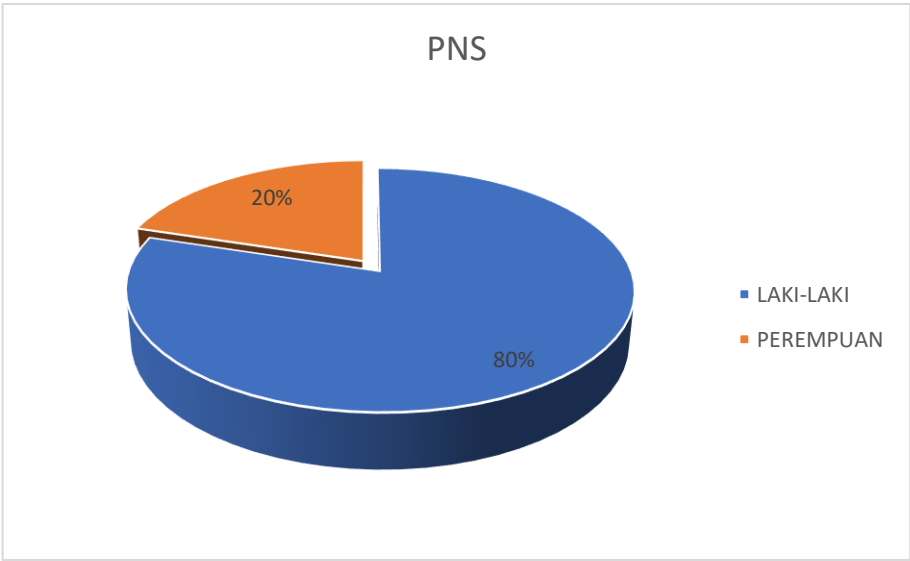
Berikut adalah data jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2025 berdasarkan pendidikan.

Tabel II.2 Pegawai Dinas Perhubungan Berdsarkan Pendidikan

JENJANG	PNS	PPPK	Paruh Waktu	JUMLAH
SD	-	-	-	-
SMP	-	-	4	4
SMA	22	130	33	185
DIPLOMA	4	11	0	15
S.1	39	85	2	123
S.2	2	0	0	2
JUMLAH	67	226	39	332

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

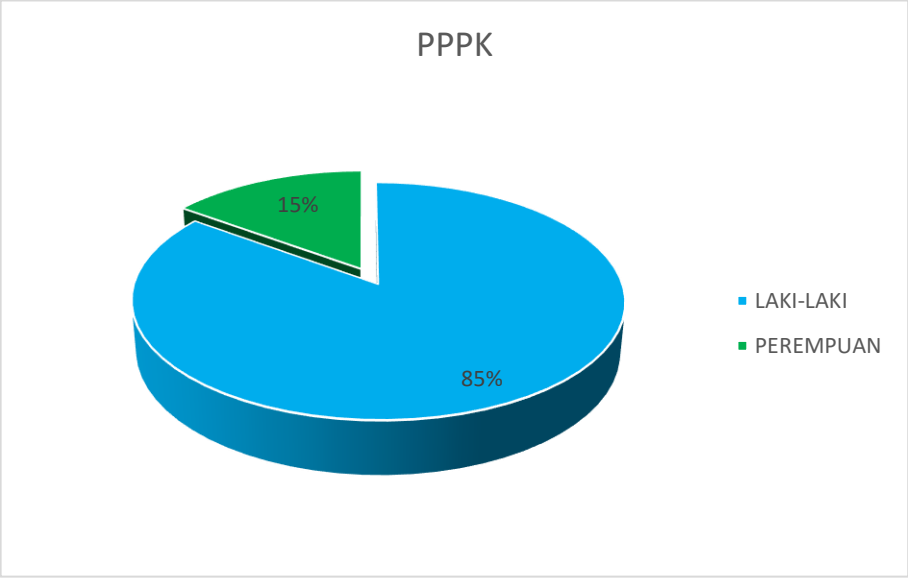
Untuk lebih jelas mengenai persentase jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten berdasarkan stastus PNS pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.1 Jumlah pegwai berdasarkan status PNS

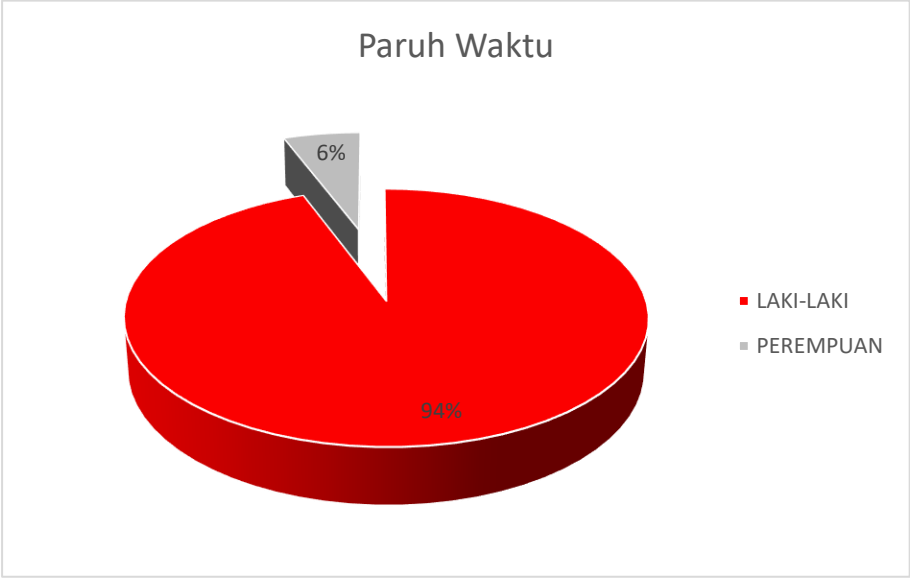
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

Untuk lebih jelas mengenai persentase jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten berdasarkan stastus PPPK pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.3 Jumlah pegwai berdasarkan status PPPK
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

Untuk lebih jelas mengenai persentase jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten berdasarkan stastus Paruh Waktu pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.4 Jumlah pegwai berdasarkan status Paruh Waktu
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

Selain Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dimulai dari kendaraan roda 2 (dua), Roda 4 (empat) dan Kendaraan besar.

Untuk lebih jelas mengenai jenis kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Tabel II.3 Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Besar

NO	MERK/TYPE	ISI SILINDER	BAHAN BAKAR	WARNA FISIK	NOMOR KENDARAAN
1	2	5	6	7	9
1	TOYOTA All New Fortuner 4x2, 2,4 VRZ A/T Diesel LUX VIN	2500 CC	SOLAR	HITAM METALIC	A 1639
2	TOYOTA All New HILUX Double Cabin V A/T Diesel VIN	2494 CC	SOLAR	HITAM METALIC	A 8324
3	TOYOTA / HIACE	2500 CC	SOLAR	SILVER METALIC	A 7081
4	MITSUBISHI /Outlander M/T	1998 CC	BENSIN	PUTIH MUTIARA	A 1506
5	TOYOTA All New HILUX Double Cabin G M/T Diesel	2494 CC	SOLAR	SILVER METALIC	A 8318
6	TOYOTA / Rush S.A/T	1495 CC	BENSIN	SILVER METALIC	A 1503
7	TOYOTA / Rush A/T	1495 CC	BENSIN	HITAM	A 1025
8	TOYOTA / Rush A/T	1495 CC	BENSIN	PUTIH	A 506
9	HINO / Light Truck Sky	4009 CC	SOLAR	PUTIH	A 8302
10	MITSUBISHI /Pajero	2477 CC	SOLAR	PUTIH MUTIARA	A 1491
11	HONDA C-RV A/T	1989 CC	BENSIN	HITAM	A 85
12	TOYOTA All New HILUX Double Cabin 4X4, 2.5 G M/T Diesel VIN	2494 CC	SOLAR	HITAM METALIC	A 8341
13	TOYOTA / Rush M/T	1495 CC	BENSIN	MERAH MARUN	A 1171
14	TOYOTA / Rush M/T	1495 CC	BENSIN	HITAM METALIC	A 951
15	TOYOTA / Rush A/T	1495 CC	BENSIN	HITAM	A 507
16	TOYOTA / Avanza Veloz A/T	1495 CC	BENSIN	HITAM METALIC	A 1565
17	TOYOTA ALL NEW HILUX	2494 CC	SOLAR	HITAM METALIC	A 8334

NO	MERK/TYPE	ISI SILINDER	BAHAN BAKAR	WARNA FISIK	NOMOR KENDARAAN
1	2	5	6	7	9
	Single Cabin STD M/T				
18	TOYOTA / Hilux Single	1998 CC	BENSIN	SILVER METALIC	A 8114
19	ISUZU/Elf Micro Bus	2771 CC	SOLAR	ABU-ABU	A 7067
20	HINO/BUS Sekolah	4009 CC	SOLAR	KUNING	A 7100
21	HINO/BUS Sekolah	4009 CC	SOLAR	KUNING	A 7111
22	HINO/TRON TON (DEREK)	7684CC	SOLAR	PUTIH BIRU	A 8397
23	TOYOTA New Corolla ALTIS 1.8 V A/T	1800 CC	BENSIN	PUTIH MUTIARA	A 1547
24	TOYOTA All New Fortuner 4X2 2.4 G M/T	2500 CC	SOLAR	SILVER METALIC	A 1563
25	TOYOTA / Avanza A/T	1298 CC	BENSIN	ABU-ABU METALIC	A 1275
26	TOYOTA / Hilux Double Cabin	2494 CC	SOLAR	PUTIH MUTIARA	A 8287
27	TOYOTA / Hilux Double Cabin	2494 CC	SOLAR	PUTIH MUTIARA	A 8288
28	TOYOTA / Hilux Double Cabin	2494 CC	SOLAR	PUTIH MUTIARA	A 8289
29	NISAN / Navara	2488 CC	SOLAR	PUTIH	A 8686
30	HINO LIGHT TRUCK/Dal mas	4009 CC	SOLAR	PUTIH	A 8382
31	HINO / Mobil Cran	4009 CC	SOLAR	ABU-ABU	A 8192
32	TOYOTA / Rush S.A/T	1495 CC	BENSIN	SILVER METALIC	A 1502
33	TOYOTA / Rush M/T	1495 CC	BENSIN	PUTIH	A 1170
34	MITSUBISHI /Pajero	2478 CC	SOLAR	PUTIH	A 1399
35	TOYOTA / Rush S.M/T	1495 CC	BENSIN	SILVER METALIC	A 1504
36	TOYOTA All New HILUX	2494 CC	SOLAR	HITAM METALIC	A 8328

NO	MERK/TYPE	ISI SILINDER	BAHAN BAKAR	WARNA FISIK	NOMOR KENDARAAN
1	2	5	6	7	9
	Double Cabin G M/T Diesel				
37	mitsubishi /Outlander A/T	1998 CC	BENSIN	PUTIH MUTIARA	A 1501
38	TOYOTA / Avanza Veloz M/T	1495 CC	BENSIN	PUTIH	A 1505
39	SUZUKI/Erti ga	1373 CC	BENSIN	PUTIH MUTIARA	A 1467
40	TOYOTA ALL NEW HILUX Single Cabin STD M/T	2494 CC	SOLAR	SILVER METALIC	A 8327
41	TOYOTA All New Fortuner 2.5 G M/T	2494 CC	SOLAR	PUTIH	A 1412
42	HINO / Light Truck Sky Lift	4009 CC	SOLAR	HIJAU BIRU	A 8242
43	HINO / Light Truck Sky Lift	4009 CC	SOLAR	HIJAU BIRU	A 8388

Sumber: Dinas Perhubungan Provisni Banten 2025

Berikut adalah jumlah kendaraan operasional Dinas Perhubungan Provinsi Banten berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) pada tahun 2025.

Tabel II.4 Kendaraan Sepeda Motor

NO	MERK/TYPE	ISI SILINDER	WARNA FISIK	NO. KENDARAAN
1	2	5	6	8
1	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6244 Z
2	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6227 Z
3	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6228 Z
4	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6232 Z
5	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6235 Z
6	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6230 Z
7	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 6240 Z
8	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 6243 Z
9	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 5981 Z
10	HONDA Revo	110CC	Merah Hitam	A 2938 A
11	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6231 Z
12	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6229 Z

NO	MERK/TYPE	ISI SILINDER	WARNA FISIK	NO. KENDARAAN
1	2	5	6	8
13	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 5982 Z
14	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 5984 Z
15	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 5985 Z
16	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 5992 Z
17	KAWASAKI KLX 150	150 CC	Hijau Metalik	A 2731 A
18	KAWASAKI KLX 150	150 CC	Hijau Metalik	A 2732 A
19	KAWASAKI KLX 150	150 CC	Hijau Metalik	A 2733 A
20	KAWASAKI Versys 650	650 CC	Abu-abu	A 6225 Z
21	KAWASAKI Versys 650	650 CC	Abu-abu	A 6226 Z
22	HONDA CRF 250	250 CC	Merah Hitam	A 4338
23	HONDA CRF 250	250 CC	Merah Hitam	A 4332
24	HONDA PCX	150 CC	Putih	A 4285
25	HONDA PCX	150 CC	Putih	A 4284
26	HONDA PCX	150 CC	Putih	A 4288
27	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6233 Z
28	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 5983 Z
29	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6234 Z
30	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 6242 Z
31	HONDA CB150R	150 CC	Hitam	A 6143 Z
32	HONDA CB150R	150 CC	Hitam	A 6146 Z
33	HONDA Vario 150	150 CC	Putih	A 6236 Z
34	HONDA Mega Pro	150 CC	Hitam	A 5977 Z
35	HONDA CB150R	150 CC	Hitam	A 6144 Z
36	HONDA CB150R	150 CC	Hitam	A 6145 Z
37	HONDA Mega Pro	150 CC	Hitam	A 5961 Z
38	HONDA Vario 125	125 CC	Putih	A 3801 Z
39	HONDA Revo	110 CC	Merah Hitam	A 2940 Z
40	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 6239 Z
41	KAWASAKI D'Tracker 150	150 CC	Hijau Metalik	A 6241 Z
42	HONDA Mega Pro	150 CC	Hitam	A 5960 Z
43	YAMAHA FJR 1300AP	1298 CC	PUTIH	A 6222 Z
44	YAMAHA FJR 1300AP	1298 CC	PUTIH	A 6223 Z

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

2.1.3.KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Untuk meninjau capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten perlu meninjau dokumen Renstra sebelumnya yaitu tahun 2017 – 2023. Terdapat beberapa capaian pada indikator utama dan beberapa indikator program, sebagaimana tabel dan penjelasan di bawah ini.

Tabel II.5 Capaian Indikator Pada Periode Renstra Sebelumnya

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIA N 2020	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen				19,7	21				21	24,72				106	82,29	Tinggi
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen				0,72	0,73				0,70	0,7				97,2	95,89	Sangat Tinggi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai				82	83				80	86,17				97,5	103,82	Sangat Tinggi
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persen			20													
Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara	Persen	100	100	100			22,54	98,33	89,29			22,54	98,33	89,29			
Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi	Persen	20	20	20			21,92	19,99	16,11			109,61	99,95	80,54			

Sumber: Evaluasi Pemprov Banten 2020 - 2024

Tabel II.6 Capaian Indikator Program Pada Periode Renstra Sebelumnya

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	Satuan	2021			2022			2023			2024			Target 2025 (RPD)	Target Akhir RPD (2026)
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
	Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	154,67	154,67	100	100
	Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan (%)					-			100	100	100	100,00	137,88	137,88	100	100
	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (%)		30,77	30,77	100	38,46	38,46	100	100	100	100	50,00	65,78	131,56	75	100
	persentase perencanaan transportasi yang diterapkan (%)		50	50	100	50	50	100	100	100	100	50,00	100,00	200,00	50	50
	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (%)		20	20	100	20	20	100	100	100	100	20,00	25,73	128,65	20	20
	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (%)		10	10	100	10	10	100	100	100	100	40,00	110,32	275,80	100	100
	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPTD) (%)		10	10	100	10	10	100	100	100	100	100,00	86,61	86,61	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	Satuan	2021			2022			2023			2024			Target 2025 (RPD)	Target Akhir RPD (2026)
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)		
	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (%)		100	100	100	100	75	75	100	100	100	100,00	96,16	96,16	100	100
	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (%)		100	87,77	87,77	100	100	100	100	100	100	100,00	89,68	89,68	100	100
	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan (Persen)		-			-			-			100,00	97,89	97,89	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN																
	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Persen)		15	15	100	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Evaluasi Pemprov Banten 2020 - 2024

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Berdasarkan pengertian secara umum Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki karakteristik serupa dan menjadi target utama dari suatu program, dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah masyarakat pengguna transportasi.

Adapun layanan yang diberikan Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten jumlah trayek yang disediakan sebanyak 164 trayek.

2. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan/Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Banten Di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer jumlah ruas jalan Provinsi Banten sebanyak 93 ruas jalan dimana hampir semua ruas jalan telah terpasang.

3. Sosialisasi Pelajar Pelopor

Sosialisasi pelopor merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, serta mendorong mereka menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Banten selalu melaksanakan kegiatan pelajar pelopor dari tingkat SD sampai dengan SMA.

4. Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas

Merupakan sebuah keputusan Kepala Dinas Perhubungan yang diterbitkan sebagai salah satu syarat dalam perizin pembangunan usaha.

5. Pembinaan Keselamatan Pelayaran

Kegiatan pembinaan keselamatan pelayaran sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten dengan cara melakukan pembinaan terhadap operator kapal.

6. Pos Perlindungan Kereta Api Di Jalan Provinsi

Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 8 (delapan) Pos Perlindungan yang dilalui Jalan Berstatus Provinsi, semua perlindungan ini dibangun untuk memberikan keamanan dan keselamatan pada perlindungan sebidang Kereta Api.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten akan selalu mendapat tantangan, hambatan dan permasalahan, oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah kebijakan untuk mengatasi tantangan, hambatan dan permasalahan tersebut, salah satu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menentukan isu strategis dan sebagai dasar dalam menentukan arah dan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan yang dimaksud.

2.2.1.PERMASALAHAN

Sejak Provinsi Banten dibentuk tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara umum masih menunjukkan ketimpangan antara Provinsi Banten Wilayah Timur – Barat (Tangerang Raya, Serang dan Cilegon) dengan Wilayah Selatan (Lebak dan Pandeglang), baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan penduduk. Hal ini tentu berimbas kepada permasalahan pembangunan transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Ketiga moda transportasi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Provinsi Banten.

Untuk mengejar pemerataan pembangunan di Provinsi Banten pembangunan dibagi menjadi 3 wilayah kerja pembangunan (WKP) dengan segala keunggulan, ikon dan potensi yang dimilikinya, yaitu:

1. Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Di dalamnya terdapat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan gerbang masuknya barang, dan penumpang melalui transportasi udara ke Indonesia.
2. Wilayah Kerja Pembangunan II (WKP II), yaitu Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang. Di dalamnya terdapat pelabuhan penyeberangan Merak yang menjadi gerbang.
3. Wilayah Kerja Pembangunan III (WKP III), yaitu Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Di dalamnya terdapat Stasiun Kereta Api yang merupakan gerbang masuk barang, dan penumpang terutama dari dan ke Jakarta.

Berdasarkan penjelasan diatas identifikasi masalah dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merujuk pada tugas dan fungsi yang selama ini diemban.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten selalu dihadapkan dengan permasalahan, sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Strategis	1. Belum Maksimalnya Rasio Konektivitas Provinsi	1. Konektivitas antar daerah terpencil belum terpenuhi 2. Kurangnya pelayanan terhadap penyelenggaraan angkutan umum 3. Menurunnya minat masyarakat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			dalam menggunakan angkutan umum
		2. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	1. Tingginya biaya operasional dalam menggunakan angkutan umum 2. Aksesibilitas terhdap angkutan umum telampau lama
		3. Belum optimalnya pelasaan kegiatan dalam menurunkan angka rasio kecelakaan	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keselamatan 2. Kondisi infrastruktur pada daerah tertentu kurang memadai

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

Tabel II.8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor	Uraian
Faktor Pendorong	
Dukungan Kebijakan	Adanya kebijakan nasional dan daerah yang sejalan, seperti RPJMN, RPJMD, dan Peraturan Menteri Perhubungan, mendorong sinergi program pembangunan.
Inovasi Teknologi	Pemanfaatan teknologi informasi (SIPD, SIMANTAP, SIPITAK) mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan.
Kolaborasi Mitra	Terjalinnya kerja sama dengan <i>Stakeholder</i> Bidang Perhubungan masyarakat dalam pembiayaan maupun pelaksanaan infrastruktur.
Kesadaran Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan infrastruktur publik.
Ketersediaan Data	Basis data teknis dan spasial yang semakin lengkap mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor Penghambat	
Keterbatasan Anggaran	Anggaran sarana prasarana Perhubungan yang terbatas menghambat pemenuhan kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah secara merata.
SDM Teknis Terbatas	Masih kurangnya tenaga ahli lalu lintas angkutan jalan, ahli navigasi pelayaran dan nautika, ahli perencanaan transportasi, PPNS Bidang Perhubungan di level daerah.
Koordinasi Lintas Sektor	Belum terlaksana secara baik kegiatan dalam Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta

Faktor	Uraian
	kordinasi dengan Pemerintah pusat yang kurang instensif.
Ketimpangan Wilayah	Konektiitas sarana dan perasarana Transportasi belum merata antara wilayah pesisir, perdesaan, dan perkotaan.
Permasalahan Kewenangan	Hambatan dalam prose pelaksanaan P3D Pelabuhan dan terminal yang berada di wilayah Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis Dinas PUPR Provinsi Banten, Tahun 2025

2.2.2.ISU STRATEGIS

Untuk menentukan sebuah isu strategis diperlukan sebuah metodologi secara empiris oleh karena itu Anasisi SWOT dipilih untuk memberikan pendakatan secara ilmiah.

Secara umum, pengertian analisis SWOT adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu : *S – Strengths* (kekuatan), *W – Weakness* (kelemahan), *O – Opportunities* (peluang), dan *T – Threats* (ancaman). Berdasarkan pengertian analisis SWOT tersebut, bisa dikatakan bahwa metode ini akan membantu mengatur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki secara sistematis. Kesimpulannya, tujuan analisis SWOT adalah membantu merencanakan strategi berdasarkan faktor-faktor yang ada

sehingga dapat mengambil keputusan tepat. Pada dasarnya manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu melakukan perencanaan secara terstruktur dengan mengetahui hal-hal berikut:

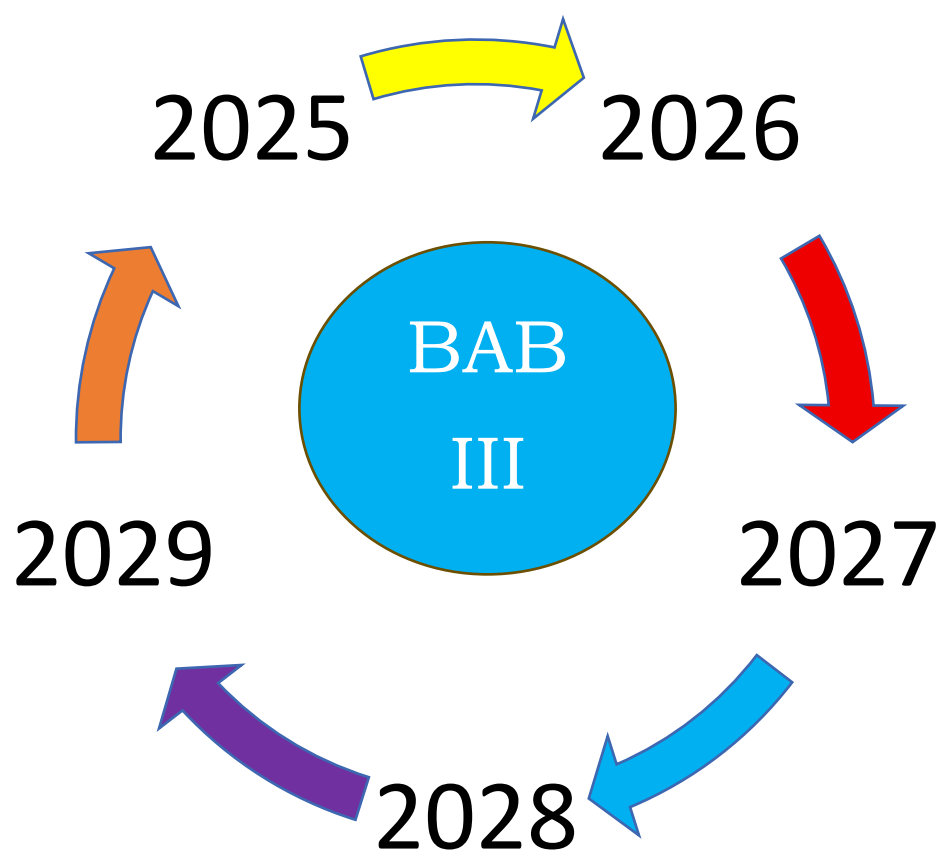
1. Bagaimana cara agar kekuatan (*strengths*) dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang (*opportunities*);
2. Bagaimana strategi mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang berisiko mencegah keuntungan;
3. Bagaimana cara agar kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada;
4. Langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan (*weaknesses*) yang berisiko menimbulkan ancaman (*threats*).

Tabel II.9 Isu Strategis Urusan Perhubungan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN URUSAN PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN URUSAN PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN URUSAN PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN URUSAN PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS URUSAN PERHUBUNGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan angkutan darat, laut, perkeretaapian	Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat	Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah di banyak kota	Penguatan integrasi antar berbagai moda transportasi (darat, laut, udara) untuk meningkatkan efisiensi dan mobilitas	Kurangnya integrasi antar berbagai moda transportasi (misalnya, bus, kereta api, dan transportasi online) menyulitkan mobilitas masyarakat	Rendahnya tingkat keselamatan/tingginya tingkat kecelakaan
Pengembangan sistem informasi transportasi multimoda	Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional	Biaya transportasi yang tinggi, terutama untuk logistik dan pengiriman barang, menjadi tantangan	Penggunaan teknologi untuk efisiensi biaya dan pengelolaan permintaan	Kerusakan jalan, terbatasnya jumlah halte, dan kondisi fasilitas transportasi umum yang kurang memadai	Lama waktu tempuh

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN URUSAN PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN URUSAN PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN URUSAN PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN URUSAN PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS URUSAN PERHUBUNGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			bagi banyak bisnis		dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik	
Pengaturan dan pengelolaan lalu lintas	Masih rendahnya ketertiban lalu lintas	Meningkatnya keselamatan transportasi nasional	Penting untuk memastikan bahwa sistem transportasi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada moda transportasi darat, menjadi perhatian utama	Biaya transportasi yang tinggi, terutama untuk transportasi jarak jauh, dapat menjadi beban bagi masyarakat	Tingginya biaya transportasi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 - 2029

Tujuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi, serta sebagai instrumen untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Dengan kata lain, Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi bekerja efektif dan berkinerja tinggi, serta dapat diukur pencapaian kinerjanya.

Untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Banten 2025-2029, diuraikan dengan beberapa tujuan yang berisi pernyataan capaian didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Dalam tujuan disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai pada masa akhir tahap perencanaan.

Tujuan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Terjangkau”**.

3.2. SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 - 2029

Sasaran dalam penyusunan Renstra untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta sebagai acuan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Renstra juga menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran kegiatan jangka menengah.

Sasaran dari tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tranportasi Laut
3. Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api

Untuk lebih jelas mengenai rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1 Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
NSPK Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Sasaran RPJMD Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Terjangkau		Rasio Konektivitas	0,70	0,72	0,74	0,75	0,76	0,78	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,70	0,70	0,70	0,72	0,74	0,74	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	10	8	7	6	5	4	
		Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan Perlindungan Kereta Api Yang Ditangani	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

3.3. STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi.

Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi.

Dengan adanya penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 terdapat beberapa strategi yang digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam rangka menyelesaikan periode renstra ini.

Untuk lebih jelas mengenai strategi Dinas Perhubungan ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
- 3. Peningkatan kualitas perlengkapan jalan perhubungan;
- 4. Optimalisasi kinerja jaringan pelayanan angkutan umum;
- 5. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- 6. Peningkatan keselamatan dan koordinasi pelayaran angkutan laut;
- 7. Peningkatan pengelolaan perkeretaapian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulakn bahwa pentahapan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dapat diturunkan melalui proyek-proyek strategis dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pada renstra periode ini.

Tabel III.2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten

	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
SASARAN PD	Penguatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan	Peningkatan daya saing sumber daya manusia berintegritas dan integrasi ekonomi domestik dan global	Penguatan kolaborasi menuju daya saing perekonomian	Percepatan pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi	Pencapaian fondasi kuat pemerataan kesejahteraan masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Peningkatan pembangunan jaringan sistem angkutan umum massal	Penguatan efisiensi konektivitas jalan, dari dan menuju kawasan pendidikan, kawasan perkantoran serta kawasan Pemukiman	Peningkatan efisiensi waktu tempuh antar pusat-pusat pertumbuhan kawasan;	Peningkatan skema pendanaan angkutan umum massal	Pemantapan Pengembangan Transportasi Publik massal
Menigkatnya Kualitas Pelayanan Tranportasi Laut	Peningkatan pembangunan pelabuhan	Penguatan efisiensi konektivitas pelabuhan	Peningktan aksesibilitasi publik terhadap layanan	Peningkatan Skema pendanaan pembangunan pelabuhan	Pemantapan Pengembangan Pelabuhan yang terintegrasi

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan	Peningkatan daya saing sumber daya manusia berintegritas dan integrasi ekonomi domestik dan global	Penguatan kolaborasi menuju daya saing perekonomian	Percepatan pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi	Pencapaian fondasi kuat pemerataan kesejahteraan masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
			transportasi yang aman		dengan moda darat
Menigkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Peningkatan pengelolaan perlintasan kereta api	Penguatan keselamatan perlintasan KA	Peningkatan area perlintasa Kereta Api sebidang yang melintasi aksesibilitasi publik	Perlntasan sebidang/tidak sebidang pada reaktivasi rel dan MRT	Pemantapan pengembangan perlintasan tak sebidang Kereta Api

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

3.4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Untuk lebih jelas mengenai teknik rumusan kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel III.3 Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten

No	OPERSIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013	Penguatan kebijakan, pembentukan kelembagaan pengelola transportasi, dan pembiayaan dalam menyediakan pelayanan transportasi umum massal yang ramah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Penigkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
2	Tentang Penyelenggaraan Perhubungan		Menigkatnya Kualitas Pelayanan Tranportasi Laut	Peningkatan Pengelolaan Pelayaran;
3			Menigkatnya Pengelolaan	Peningkatan Pengelolaan Perkeretaapian

No	OPERSIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
		lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat yang menghubungkan antar kota dan desa serta pusat ekonomi	Perlindungan Kereta Api	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

3.5. PROGRAM PRIORITAS RENSTRA TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang merupakan reperesetasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten maka dapat dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang saling terintegrasi dengan perencanaan sektoral, perencanaan pemerintah pusat kepada daerah, maupun kebijakan lainnya.

Untuk lebih jelas mengenai program prioritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUT COME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas			Indeks Williamson (Indeks)		
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi		Rasio Konektivitas Provinsi (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas angkutan darat (%)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya pembangunan	Presentase kelengkapan	2.15.02 Program Penyelenggaraan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUT COME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			prasarana dan perlengkapan jalan di jalan provinsi	jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan sebidang kereta api	Persentase keselamatan di perlintasan sebidang kereta api yang ditangani (%)	2.15.05 program pengelolaan perkeretaapian	
			Menurunnya angka kecelakaan pelayaran	Persentase penurunan angka kecelakaan pelayaran (%)	2.15.03 program pengelolaan pelayaran	
			Menurunnya daerah rawan kecelakaan	Persentase daerah rawan kecelakaan yang ditangani (%)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUT COME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terfasilitasinya pemeliharaan lampu penerangan jalan	Persentase pemeliharaan lampu penerangan jalan (%)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025 -2029

3.6. RUMUSAN PROGRAM PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdapat beberapa program unggulan yang menjadi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Adapun Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.



Gambar III.1 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2025-2029

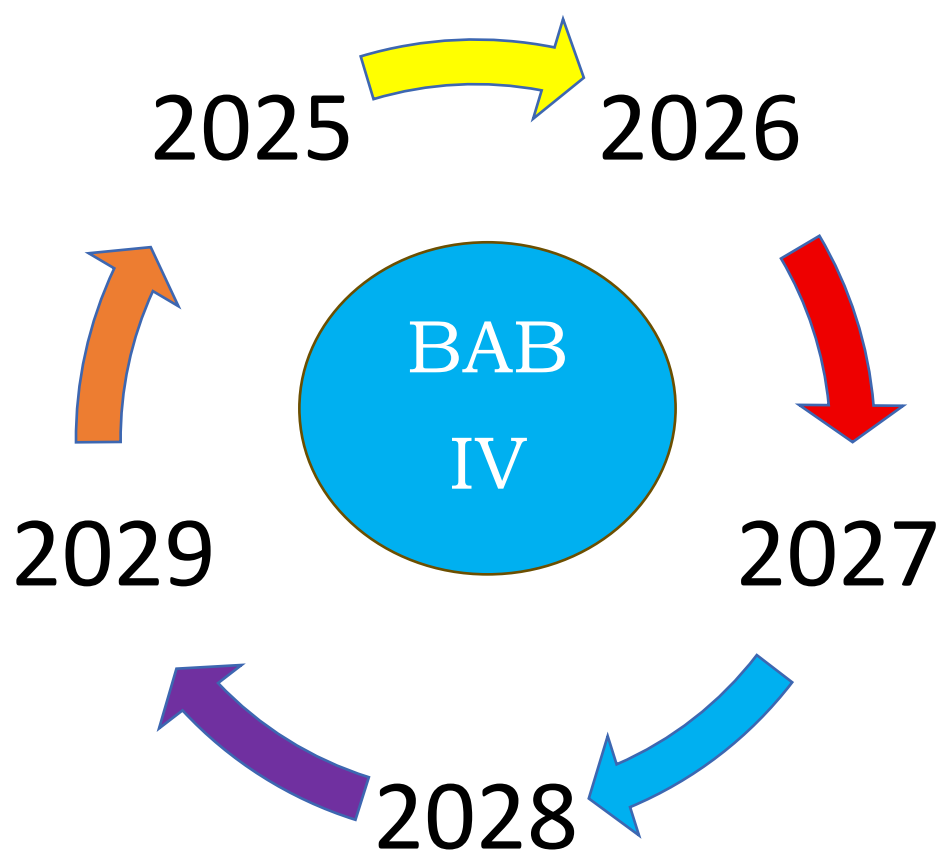
Tabel III.5. Indikasi Kegiatan Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN
BANTEN BAGUS	BARATA	Peningkatan Konektivitas Transportasi	Sistem Angkutan Umum Massal (Saum) Di Serang Metropolitan Area	Sistem Angkutan Umum Massal (Saum) Di Serang Metropolitan Area	5 Koridor 1. Term. Pakupatan – Untirta Sindangsari) 2. Term.Cipocok Term.Kalijaga Rks. Bitung 3. Banten Lama - Baros 4. Term. Pakupatan PCI 5. Term. Pakupatan - Cikande
BANTEN BAGUS	BARATA	Peningkatan Konektivitas Transportasi	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8.483 Unit
BANTEN BAGUS	BARATA	Peningkatan Konektivitas Transportasi	Pelayanan Angkutan Perkretaapian	Rencana Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkeretaapian	1 Dokumen
BANTEN BAGUS	BARATA	Peningkatan Konektivitas Transportasi	Pembangunan Terminal	Pembangunan Terminal Tipe B Maja, Kab. Lebak	1 Lokasi
BANTEN RAMAH	ZONA SERLOK	Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas	Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas	5 Dokumen
BANTEN INDAH	BANG SONI	Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Pembangunan Pelabuhan Wisata	Pembangunan Perlabuhan Wisata Sumur	1 Lokasi

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN
BANTEN INDAH	BANG SONI	Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Moda Transportasi Menuju Destinasi Wisata	Penyediaan Moda Angkutan Wisata	2 Rute 1. Term. Pakupatan – KP3B- Palima – Kebon Jahe – Ciracas – Kependean – Kramatwatu – Tasikardi – Banten Lama --- PP 2. Term. Pakupatan – Jl. Sudirman – Jl. A. Yani – Veteran – Alun alun Kota Serang – Kelapa Dua – Kasemen – Banten Lama --- PP
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	Peningkatan Intelektual Dan Karakter Masyarakat	Penyediaan Moda Transportasi Siswa	Penyediaan Moda Transportasi Siswa	2 RUTE 1. Ciomas-Serang (Kota) 2. Kasemen - Serang (Kota)
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Transformasi Organisasi/Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif Dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	5 Paket
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas	Inventarisasi Dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah	5 Dokumen

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN
		Tinggi, Lincah, Adaptif dan Kolaboratif			

Sumber: RPJM Provinsi Banten 2025 – 2029



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Program adalah merujuk pada upaya terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Program ini biasanya berisi serangkaian kegiatan yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait, dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program-program ini umumnya dicantumkan dalam Renstra.

Kegiatan mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Dalam periode penyusunan renstra ini Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Untuk lebih jelas terkait penjelasan lebih lanjut mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1. Program Kegiatan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Provnsi Banten

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
- Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Terwujudnya layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau				Rasio konektivitas (Rasio)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat			Rasio Konektivitas Darat (Rasio)		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.15.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.15.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan pelayan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Darat		Konektivitas Angkutan Darat (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya kebutuhan angkutan umum dalam satu daerah provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Presentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terpasangnya Perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi sesuai kebutuhan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terselenggaranya pengelolaan terminal penumpang tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
			Menurunnya daerah rawan kecelakaan		Persentase Daerah rawan kecelakaan yang ditangani (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Jalan Provinsi yang Direncanakan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Terbitnya persetujuan/ rekomendasi andalalin yang terawasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
				Terselenggaranya keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.1.07.0005 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	2.15.02.1.07.0008 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut			Konektivitas Laut (Unit)		
			Menurunnya angka kecelakaan pelayaran		Persentase penurunan angka kecelakaan pelayaran (%)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Terselenggaranya pembinaan keselamatan angkutan laut kewenangan provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	
				Terfasilitasinya pelayanan angkutan Pelabuhan pengumpan regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia (Unit)	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
					Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
					Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	2.15.03.1.09.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia (Unit)	2.15.03.1.09.0005 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	
		Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api			Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)		
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan sebidang Kereta Api		Persentase Keselamatan di Perlintasan sebidang Kereta api yang ditangani (%)	2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Identifikasi bahan rumusan kebijakan Penetapan pelayanan Jaringan Perkeretaapian pada Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.05.1.06 - Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.05.1.06.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	
2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan							
- Meningkatkan Konektivitas Transportasi	Terwujudnya layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana (Pada UPT PPP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Pada UPT PPP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan pelayanan penunjang kantor (Pada UPT PPP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah (Pada UPT PPP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terfasilitasinya Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan		Persentase Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025

Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				80.017.780.000		73.757.779.954		77.916.680.000		80.364.079.000		83.808.002.000		85.836.336.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				39.634.519.000		61.464.151.754		62.545.177.000		64.108.806.000		65.711.527.000		67.354.315.000	
Outcome: Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	53.96	n/a	39.334.519.000	80	54.729.151.754	83	55.099.068.490	85	56.768.008.600	87	57.240.027.490	90	57.654.580.490	
Perencanaan,Pe nganggaran, dan Evaluasi Kinerja				420.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	160.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	6	120.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	
2.15.01.1.02Ad ministrasi Keuangan				28.603.899.000		46.589.197.264		47.272.564.000		48.428.593.000		49.613.523.000		50.828.076.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	102	27.832.154.000	97	45.557.802.264	97	46.241.169.000	97	47.397.198.000	97	48.582.128.000	97	49.796.681.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1	604.830.000	12	885.950.000	12	885.950.000	12	885.950.000	12	885.950.000	12	885.950.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	88.325.000	12	85.445.000	12	85.445.000	12	85.445.000	12	85.445.000	12	85.445.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.150.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	1	1	34.971.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	18	12	34.944.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	7.525.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000		50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaa	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Daerah pada SKPD	n Barang Milik Daerah pada SKPD dan Tunjangan ASN														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		500.000.000		200.000.000		200.000.000		500.000.000		200.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	n/a	n/a	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1	50.000.000	97	300.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	97	300.000.000	n/a	n/a	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				986.870.000		716.270.000		672.820.000		672.820.000		872.820.000		672.820.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	480.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	5	189.584.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	0	n/a	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	4	65.000.000	3	72.820.000	3	72.820.000	3	72.820.000	3	72.820.000	3	72.820.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	202.286.000	12	193.450.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	350.000.000	12	150.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1	n/a	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Elektronik pada SKPD	Elektronik pada SKPD														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		1.400.000.000		1.200.000.000		1.912.911.110		700.000.000		400.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	n/a	1	800.000.000	1	500.000.000	1	1.612.911.110	0	n/a	0	n/a	
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	0	n/a	10	400.000.000	10	500.000.000	10	100.000.000	10	500.000.000	10	200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	77	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.473.750.000		2.965.000.000		2.965.000.000		2.965.000.000		2.965.000.000		2.965.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1	973.750.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	7.500.000.000	12	2.165.000.000	12	2.165.000.000	12	2.165.000.000	12	2.165.000.000	12	2.165.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				600.000.000		1.728.684.490		1.928.684.490		1.728.684.490		1.728.684.490		1.728.684.490	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	45	0	500.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	67	40.000.000	24	1.028.684.490	24	1.028.684.490	24	1.028.684.490	24	1.028.684.490	24	1.028.684.490	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	74	30.000.000	117	100.000.000	117	100.000.000	117	100.000.000	117	100.000.000	117	100.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	2	30.000.000	2	200.000.000	2	400.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
Outcome: Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi pada	53.96	n/a	300.000.000	80	6.735.000.000	83	7.446.108.510	85	7.340.797.400	87	8.471.499.510	90	9.699.734.510	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah														
Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.000.000		650.000.000		400.000.000		455.797.400		586.499.510		550.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	n/a	n/a	2	400.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	30.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	255.797.400	12	386.499.510	12	350.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah				n/a		900.000.000		861.108.510		700.000.000		700.000.000		700.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1	900.000.000	1	861.108.510	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000		4.560.000.000		5.560.000.000		5.560.000.000		6.560.000.000		7.824.734.510	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	12	4.500.000.000	12	5.500.000.000	12	5.500.000.000	12	6.500.000.000	12	7.764.734.510	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	2	200.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang Disediakan														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				n/a		625.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	n/a	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				20.462.781.000		9.998.769.200		13.786.698.990		14.545.860.000		17.196.475.000		17.582.021.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan	Konektivitas Angkutan Darat	68,60	68,60	9.814.520.000	61,59	5.300.000.000	61,59	6.838.498.500	61,59	6.992.348.400	61,59	9.859.946.000	61,59	10.245.492.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Transportasi Darat															
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2	2	400.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2	2	600.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Outcome: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				8.814.520.000		5.100.000.000		6.638.498.500		6.792.348.400		9.659.946.000		10.045.492.000	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Jumlah Laporan pengendalian	1	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi														
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	2	8.714.520.000	4	5.000.000.000	6	6.538.498.500	6	6.692.348.400	6	9.559.946.000	6	9.945.492.000	
Outcome: Meningkatnya Pembangunan Prasaranadan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Presentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	53,76	86,02	3.614.923.697	86,02	1.900.000.000	91,40	2.200.000.000	94,62	2.400.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				3.364.923.697		1.400.000.000		1.700.000.000		1.900.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	11	2	200.000.000	1	200.000.000	3	500.000.000	4	700.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	9	4	1.804.923.697	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5	5	1.000.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	6	5	360.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		100	100	250.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1	1	250.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
Outcome: Menurunnya	Persentase Daerah rawan	12.50	100	7.033.337.303	40	1.798.769.200	60	3.748.200.490	80	4.153.511.600	100	4.136.529.000	100	4.136.529.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
daerah rawan kecelakaan	kecelakaan yang ditangani														
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provins				6.458.337.303		1.383.769.200		2.656.529.000		2.673.511.600		2.656.529.000	100%	2.656.529.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provins	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	2	2	500.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2	2	200.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	2	4	3.958.077.303	27	863.769.200	27	1.636.529.000	27	1.653.511.600	27	1.636.529.000	27	1.636.529.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pengadaan dan Pemasangan														
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	5	5	1.800.260.000	2	500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Audit dan Inspeksi				550.000.000		315.000.000		991.671.490		1.380.000.000		1.380.000.000		1.380.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Keselamatan LLAJ di Jalan															
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1	1	150.000.000	n/a	n/a	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	1	1	100.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	4	961.671.490	5	1.350.000.000	5	1.350.000.000	5	1.350.000.000	
Outcome: Terfasilitasinya Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Persentase Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	10,91	n/a	n/a	27,26	1.000.000.000	43,62	1.000.000.000	59,98	1.000.000.000	76,34	1.000.000.000	98,15	1.000.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				n/a		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	100	n/a	n/a	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
Program Pengelolaan Pelayaran				19.920.480.000		623.789.000		1.084.804.010		1.209.413.000		400.000.000		400.000.000	
Outcome: Menurunnya angka kecelakaan pelayaran				19.920.480.000		623.789.000		1.084.804.010		1.209.413.000		400.000.000		400.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut				745.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kot a dalam Wilayah Daerah Provinsi															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	2	3	745.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				19.175.480.000		423.789.000		884.804.010		1.009.413.000		200.000.000		200.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang	1	1	475.480.000	1	323.789.000	2	784.804.010	2	909.413.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regiona	Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian														
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1	1	18.700.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Program Pengelolaan Perkeretaapian						1.671.070.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan sebidang Kereta Api	Persentase Keselamatan di Perlintasan sebidang Kereta api yang ditangani	100	n/a		100	1.671.070.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi						1.671.070.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Sosialisasi dan Uji Coba	Jumlah Dokumen	n/a	n/a	n/a	5	1.671.070.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	

BIDANG URUSANA PROGRAM/ OUT COME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 - 2030												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi														

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025 - 2029

Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Darat	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dalam rangka mendukung program unggulan: 1. BANTEN BAGUS (Sistem Angkutan Umum Massal (Saum) Di Serang Metropolitan Area) 2. BANTEN CERDAS (Penyediaan Moda Transportasi Siswa) 3. BANTEN INDAH (Penyediaan Moda Angkutan Wisata)
		Meningkatnya Pembangunan Prasaranadan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dalam rangka mendukung program unggulan “BANTEN BAGUS”

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				(Penerangan Jalan Umum (PJU))
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dalam rangka mendukung program unggulan “BANTEN BAGUS” (Pembangunan Terminal Tipe b Maja, Kab. Lebak)
	Program Pengelolaan Pelayaran	Menurunnya angka kecelakaan pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dalam rangka mendukung program unggulan “BANTEN RAMAH” (Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas dan Pembangunan Perlabuhan Wisata Sumur)
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan sebidang Kereta Api	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan	Dalam rangka mendukung program unggulan “BANTEN BAGUS”

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	(Rencana Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkeretaapian)
	Program Tatakelola Pemerintah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	“BANTEN MELAYANI” (Dukungan pemanfaatan Aset daerah dan Inventarisasi dan penataan aset perangkat daerah)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	“BANTEN MELAYANI” (Dukungan pemanfaatan Aset daerah dan Inventarisasi dan penataan aset perangkat daerah)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	“BANTEN MELAYANI” (Dukungan pemanfaatan Aset daerah dan Inventarisasi dan penataan aset perangkat daerah)
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	“BANTEN MELAYANI” (Dukungan pemanfaatan Aset daerah dan Inventarisasi dan penataan aset perangkat daerah)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025 -2029

4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu tujuan atau sasaran strategis, baik di tingkat organisasi.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki IKU Berupa Rasio Konektivitas yang terbagi kedalam 3 indikator yaitu:

- 1. Rasio Konektivitas Darat
- 2. Rasio Konektivitas Laut
- 3. Cakupan Perlintas Kereta Api yang dilayani

Dengan ketiga IKU tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk lebih jelas mengenai penjabaran IKU Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tebal IV.4 Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Provinsi Banten

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Konektivitas	Nilai	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	
2	Rasio Konektivitas Darat	Nilai	0,70	0,70	0,70	0,72	0,74	0,74	
3	Rasio Konektivitas Laut	Nilai	10	8	7	6	5	4	
4	Cakupan Perlintas Kereta Api yang dilayani	Nilai	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025 -2029

4.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

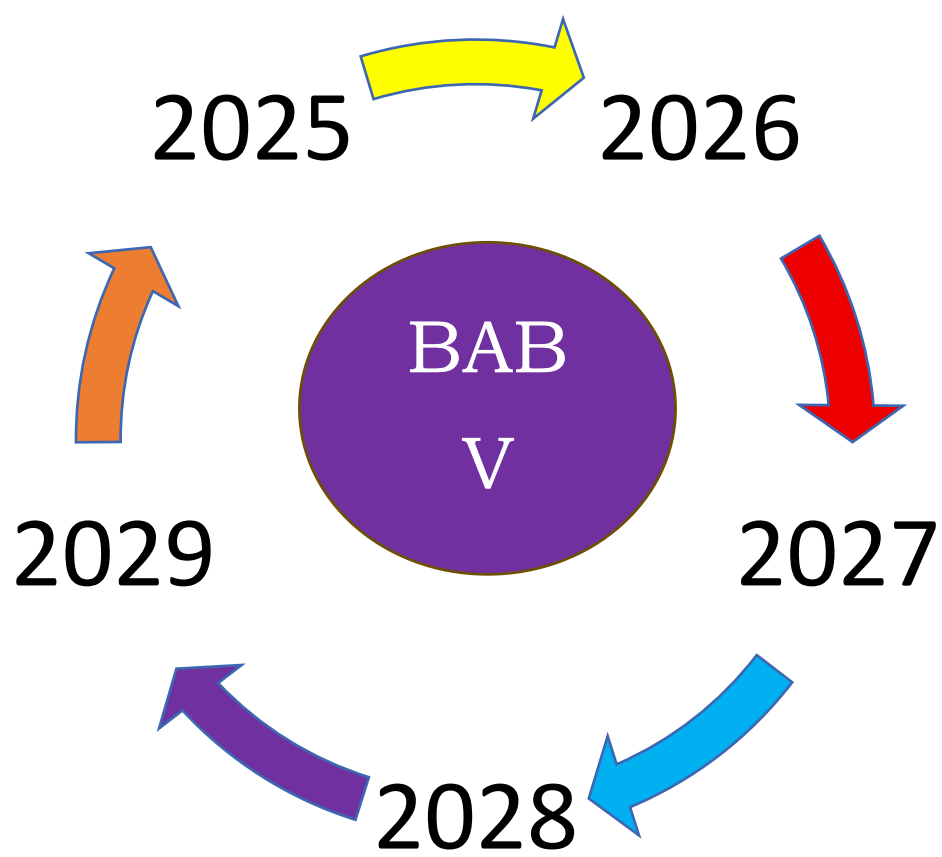
IKK merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal ini IKK membantu Dinas Perhubungan untuk mengukur, dan mengevaluasi kinerja, serta memberikan saran untuk perbaikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Untuk lebih jelas mengenai IKK Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Provinsi Banten

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas darat	Rasio	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,74	Outcome LPPD
2	Persentase keselamatan di perlintasan sebidang kereta api yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemeliharaan lampu penerangan jalan	Persentase	10,91	10,91	27,26	43,62	59,98	76,34	
4	Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persentase	53,76	81,72	86,02	91,4	94,62	100	
5	Persentase daerah rawan kecelakaan yang ditangani	Persentase	12,5	20	40	60	80	100	
6	Konektivitas angkutan darat	Persentase	68,6	61,59	61,59	61,59	61,59	61,59	
7	Persentase penurunan angka kecelakaan pelayaran	Persentase	-	10	8	7	6	5	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2025



BAB V

PENUTUP

Untuk mendukung program prioritas Pembangunan Daerah melalui program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2025-2029.

Maka perlu adanya strategi dan kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada sektor transportasi, mengingat terdapat banyak sekali program unggulan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten diantaranya:

1. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Saum) Di Serang Metropolitan Area.
2. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
3. Rencana Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkeretaapian.
4. Pembangunan Terminal Tipe B Maja, Kab. Lebak.
5. Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas.
6. Pembangunan Pelabuhan Wisata Sumur.
7. Penyediaan Moda Angkutan Wisata.
8. Penyediaan Moda Transportasi Siswa.

Dengan adanya indikasi dari kegiatan prioritas di atas maka perlu dukungan secara teknokrasi dan kebijakan politik hal ini dilakukan dalam rangka memajukan masyarakat Provinsi Banten sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu **BANTEN MAJU, ADIL MERATA DAN TIDAK KORUPSI**.